

Hasil Penilaian BPK RI Perwakilan Kalbar Pemprov Peringkat Bawah, KKR Unggul

PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar melansir hasil tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan, penyelesaian kerugian daerah serta laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II Tahun 2011 pemerintah daerah se-Kalbar. Pemprov Kalbar di urutan terbawah, sedangkan Kubu Raya justru melejit unggul.

"Tolak ukur penilaian sama dengan yang digunakan pada semester I tahun 2011, tingkat kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi dan tingkat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti," kata Ir Adi Sudiby MM, Kepala BPK RI Perwakilan

■ Halaman 7

Peringkat Tindak Lanjut BPK RI

Institusi	Peringkat	Skor	point
Kubu Raya	1	60	naik 1 point
Kapuas Hulu	2	53	turun 4 point
Sintang	3	44	naik 10 point
Sambas	3	42	turun 15 point
Sanggau	4	37	naik 10 point
Landak	5	34	turun 10 point
Kota Pontianak	6	32	naik 3 point
Kayong Utara	6	29	turun 8 point
Bengkayang	7	28	turun 15 point
Singkawang	7	27	turun 7 point
Sekadau	8	24	turun 18 point
Pontianak	8	23	turun 10 point
Ketapang	8	23	naik 1 point
Pemprov	9	12	turun 10 point
Melawi	9	12	turun 2 point

Sumber: BPK RI Perwakilan Kalbar

Pemprov Peringkat

..... dari halaman 1

Kalbar kepada Equator, Jumat (20/1).

Dijelaskannya, skala penilaian menggunakan nilai nol hingga 60. Pemprov Kalbar menduduki peringkat 9 dengan skor 12 (turun 10 point) dan Kabupaten Melawi di peringkat yang sama dengan skor 12 (turun 2 point). "Kabupaten Kubu Raya berada pada peringkat pertama dengan skor 60 atau naik 1 point," kata Adi Sudiby.

Peringkat selanjutnya, kata Adi Sudiby, ditempati Kabupaten Kapuas Hulu dengan skor 53 (turun 4 point), Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sambas dengan skor masing-masing 44 (naik 10 point) dan 42 (turun 15 point).

Peringkat keempat ditempati Kabupaten Sanggau dengan skor 37 (naik 10 point), peringkat kelima Kabupaten Landak dengan skor 34 (turun 10 point),

peringkat keenam Kota Pontianak dengan skor 32 (naik 3 point) dan Kabupaten Kayong Utara dengan skor 29 (turun 8 point).

Peringkat ketujuh Kabupaten Bengkayang dengan skor 28 (turun 15 point) dan Kota Singkawang dengan skor 27 (turun 7 point). Peringkat kedelapan Kabupaten Sekadau dengan skor 24 (turun 18 point), Kabupaten Pontianak dengan skor 23 (turun 10 point) dan Kabupaten Ketapang dengan skor 23 (naik 1 point).

selalu menjaga konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kepada pemerintah daerah yang lain, diharapkan berlomba meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan lebih baik lagi," ujar dia.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Sigit Pratama Yudha SH berjanji dalam waktu dekat ini akan disampaikan hasil pemantauan tersebut dalam bentuk angka.

Ditemui usai penyerahan hasil pemantauan di Kantor BPK RI, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menjelaskan, kalau dari segi tindak lanjut ada peningkatan. "Tim sudah dibentuk dan bahkan sudah dikembalikan sekitar Rp 3 miliar lebih," katanya.

Christiandy mengatakan, pihaknya terus berupaya melalui tim yang dibentuk sejak September 2011 lalu untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap kerugian daerah. "Keinginan kita adalah bagaimana bisa tercipta suatu pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan dalam mencapai good governance," ucap Christiandy.

Ia menambahkan, yang menjadi harapan pemerintah provinsi adalah bagaimana uang bisa dimanfaatkan dengan baik dan menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat. Meski demikian, Christiandy men-

penyimpangan yang terindikasi merugikan keuangan negara.

"Saya sendiri dalam tahun kemarin dua kali di inspektorat memimpin pertemuan. Kita undang dari unsur BPK, bagaimana kita segera selesaikan. Termasuk sosialisasi Permendagri 32 2011 tentang hibah dan bansos, kenapa perlu perhatian karena temuan itu juga banyak di bansos," jelas dia.

Temuan itu, katanya, mulai dari 2005 dan harus diselesaikan semua sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Temuan yang sudah sampai kerugian negara kendalanya pelakunya sudah lama dan contohnya ada yang sudah meninggal, ahli warisnya tidak ada. Tidak ketemu. Kalau masalah administrasi misalnya adanya perubahan yang harus kita sesuaikan, dan tengah diperbaiki.

Dihubungi terpisah, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan SH mengaku bersyukur atas penilaian itu. "Semua ini hasil kerja bersama di internal Pemkab Kubu Raya yang didasari komitmen untuk menerapkan pemerintahan yang taat aturan dalam pengelolaan keuangan," ujar Muda.

Muda menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah mengayomi sehingga terjalin efektivitas komunikasi dan

saja penyampaian data untuk kepentingan proses audit dan lainnya, termasuk peran inspektorat sebagai pengendali pengawasan internal," ujar Muda.

Sebelumnya, kata Muda, dilaksanakan penandatanganan pakta integritas pada tahun lalu. Di dalamnya terdapat keharusan menindaklanjuti dalam waktu tertentu jika ada temuan. "Berarti pakta integritas itu dilaksanakan, tak sia-sia. Tercermin dari tingkat kepatuhan melaksanakannya," kata Muda.

Muda memang getol memberikan gambaran atas substansi penyelesaian masalah jika terdapat temuan.

Tak terkecuali pengarahan soal birokrasi yang senantiasa harus berjalan dinamis. Sedangkan jabatan tak selamanya karena ada pensiun.

Misalnya, kata Muda, kepala dinas tak mungkin selamanya menjadi kepala dinas. Sehingga kita arahkan agar tidak mewariskan pola menunda-nunda dan tanggung jawab. "Jadi, jangan tahunya menggunakan APBD saja terutama berkaitan dengan belanja langsung, tetapi giliran pertanggungjawaban tak bisa," papar Muda. (jul)